

**Wisata**

dalam acara Editorial Kedaulatan Rakyat (KR), Selasa (17/11).

Editorial kali ini mengangkat tema 'Gunung Merapi Terkini, Ancaman dan Antisipasinya' dipandu host Redaktur Pelaksana KR Primaswolo Sudjono. Siaran ulang acara bisa disimak di *channel Youtube Kedaulatan Rakyat TV*.

Menurut Sri Pumomo, objek-objek wisata di Sleman, khususnya spot di lereng Merapi yang jaraknya lebih dari 5 Km dari puncak masih cukup banyak dan tidak kalah menariknya, seperti Jip Lava Tour. Para pemandu wisata lereng Merapi sudah dibekali aplikasi yang dapat mengukur jarak, sehingga tidak akan masuk ke radius 5 Km. "Masyarakat DIY dan sekitar-

**Sambungan hal 1**

nya yang ingin berwisata ke Sleman seperti Kaliurang atau Lava Tour masih tetap bisa berkunjung, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Terkait upaya kesiapsiagaan dan antisipasi dampak letusan Merapi, Pemerintah Kabupaten Sleman mengikuti rekomendasi dari BPPTKG. Untuk warga Dusun Kalitengah Lor yang jaraknya kurang dari 5 Km dari puncak sebagian besar sudah mengungsi ke barak-barak pengungsian di Desa Glagaharjo Cangkringan. Total hingga Selasa (17/11) sore jumlah pengungsi sebanyak 237 jiwa, yang merupakan kelompok rentan, lansia, bayi, ibu menyusui, ibu hamil dan difabel.

"Karena mereka termasuk kelompok

rentan, maka harus dilindungi agar tidak terpapar Covid-19. Maka siapapun (relawan) yang ingin membantu pengungsi harus menjalani rapid test. Desa Glagaharjo yang masih zona hijau harus kita pertahankan," katanya.

Sementara Kepala BPPTKG Dr Hanik Humaida mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Merapi terus meningkat. Meskipun data-data pemantauan tersebut menunjukkan angka yang tinggi, namun tidak ada kenaikan yang signifikan. "Artinya aktivitas Merapi saat ini kondisinya stabil, tapi stabil tinggi," kata Hanik. Sedangkan dari pemantauan morfologi kawah Merapi, terdapat perubahan, namun tidak signifikan.

(Dev)-f

**SUARAKAN MOSI TAK PERCAYA**

**Aksi Demo di Gejayan Tak Kantongi Izin**

**SLEMAN (KR)** - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kembali melakukan aksi demonstrasi di simpang tiga Colombo, Gejayan, Depok, Sleman, Selasa (17/11). Meski tak melayangkan perizinan, aksi demonstrasi menentang Omnibus Law ini tetap dijaga personel dari Polres Sleman.

Kapolres Sleman AKBP Anton Firmanto mengungkapkan, aksi demonstrasi ini tidak berizin. Padahal sesuai aturan, jika akan melaksanakan demonstrasi, tiga hari sebelumnya sudah harus mengajukan izin dan mendapat rekomendasi dari kepolisian. "Sama sekali tidak ada izin. Kami juga tidak pernah mengeluarkan izin baik itu izin keramaian," kata AKBP Anton Selasa (17/11).

Untuk mengamankan aksi demonstrasi kali ini, Polres Sleman mengerahkan 250 personel. Selama demonstrasi berlangsung, arus lalu lintas di sekitar Sim-



KR-Mahar Prastiwi

**Aksi demo menolak Omnibus Law di Simpang Tiga Colombo, Gejayan.**

pang Tiga Colombo juga harus dialihkan. "Untuk protokol kesehatan, kami juga terus sampaikan agar para peserta tetap menerapkan hal itu," urai Kapolres.

Humas aksi Revo mengaku, sudah berkoordinasi dengan polisi. Termasuk untuk mengarahkan lalu lintas dan membantu mengamankan warga lainnya. Revo menegaskan dalam aksi ini, pihaknya tidak ingin melukai warga. "Kami juga warga, warga bukan lawan kami. Kita semua warga

Yogya di sini, sebisa mungkin kami tidak mengganggu warga. Kita sudah berkoordinasi dengan aparat," ungkap Revo di sela-sela aksi.

Disinggung soal tujuan aksi ini, Revo menerangkan, massa aksi tetap menyuarakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Mereka juga tidak meminta pemerintah, namun akan mendorong dan menunjang kekuatan massa. "Bahwa ini adalah massa yang tidak akan dipecah," tegasnya. (Aha)-d

**Ribuan**



KR-Istimewa

**Warga berdiri di antara genangan air akibat banjir di Cilacap.**

dengan 129 jiwa harus mengungsi ke MI Muhammadiyah Gentasari, akibat rumahnya tidak bisa ditempati karena tinggi genangan banjir mencapai 1,5 meter.

Di Desa Mujur Lor terdapat 685 KK dengan 2.150 jiwa yang terdampak dan sedikitnya 19 KK dengan 76 jiwa warga Dusun Pecangakan dan Rawaseser mengungsi ke Masjid Al-Ikhlas Mujur Lor.

Adapun Desa Kedawung terdapat 47 KK dengan 188 jiwa yang terdampak, dengan tinggi genangan 20-50 cm. Desa Mujur 781 KK terdampak, seluruhnya warga Dusun Bander dan warga yang mengungsi masih diinventarisasi. Kemudian Desa Sikampung 586 KK warga Dusun 1, 2, 3, 4 dengan tinggi genangan 20-70 cm mengakibatkan puluhan KK harus mengungsi di rumah kerabatnya.

**Sambungan hal 1**

Di Desa Buntu 250 KK warga Dusun Buntu RT 1, 2, 3, 4, 5, RW 4 yang terdampak banjir. Namun di desa tersebut dinyatakan tidak ada yang mengungsi.

Banjir di Kecamatan Kroya tersebut mengakibatkan arus lalu lintas Cilacap-Banyumas tersendat karena beberapa titik ruas jalan utama di Wilker ULP Kroya tergenang banjir. Di antaranya, Jalan Raya Buntu-Kroya, Jalan Raya Sidamulya-Kroya, Jalan Raya Nusawungu-Kroya, dan Jalan Raya Kebarongan-Kedung Pring.

Kecamatan Sidareja terdapat lima desa yang dilanda banjir dengan 1.950 KK yang terdampak dengan tinggi genangan mencapai 1,5 meter dan 44 KK harus mengungsi pada empat titik pengungsian, terdiri Balai Penyuluh KB Sidareja, Koramil 11, Kantor Desa dan Bumdes Sidareja. Kelima desa yang tergenangi banjir tersebut terdiri Desa Sidareja dengan 550 KK terdampak, dengan tinggi genangan mencapai 1,5 meter, Desa Gunungreja 719 KK terdampak dengan 13 KK 28 jiwa mengungsi, Desa Sidamulya 224 KK terdampak, Desa Sudagaran 162 KK terdampak, Desa Tinggarjaya 53 KK terdampak, dan Desa Tegalsari 213 KK terdampak. Banjir di Sidareja menyebabkan arus lalu lintas Cilacap-Pangandaran tersendat.

Kecamatan Kedungreja terdapat tiga desa dengan 260 KK terdampak banjir. Terdiri Desa Rejamulya (Dusun Rejamulya 25 KK terdampak), Desa Bangunreja (Dusun Karangtengah 137 KK dan Dusun Cipriyuk 80 KK), Desa Ciklapa (Dusun Panebasan 18 KK terdampak). Kecamatan Wanareja terdapat

dua desa terdampak banjir terdiri Desa Tarisi 21 KK, Desa Purwasari (Dusun Gayamsari 107 KK, Dusun Mulyasari 249 KK dan Dusun Purwayasa 148 KK).

Kecamatan Cipari terdapat satu desa terdampak banjir dengan 80 KK terdampak dengan tinggi genangan 50-70 cm. Kecamatan Bantarsari terdapat tujuh desa yang terdampak banjir, namun karena medan cukup sulit dan aliran listrik terputus, sehingga petugas baru mencatat Desa Cikedondong 30 KK, Desa Kamulyan 750 KK dengan 100 KK mengungsi, Desa Bulaksari 255 KK, Desa Bantarsari 585 KK, Desa Rawajaya 450 KK. Sedang Desa Kedungwadas dan Binangun belum terjangkau. Kecamatan Sampang terdapat satu desa terdampak banjir, Desa Karangasem 80 KK dengan 240 jiwa tergenangi banjir setinggi 70 cm.

Di samping banjir, dua kecamatan lain terdiri Cimanggu terdapat empat titik tanah longsor yang terjadi di Desa Panimbang, bangunan TK milik desa, Rumah Ny Kasnyah warga RT 03/09 dan rumah milik Ny Tarsinem warga RW 06 mengalami rusak berat, dan sebuah musala terancam. Dalam kejadian tersebut Tri Adiguna (30) warga RT02/06 Desa Panimbang mengalami luka-luka tertimpa longsor tanah.

Di Kecamatan Karangpucung terjadi tanah longsor pada sembilan titik desa, terdiri Desa Karangpucung, Sindangbarang, Gunungtelu, Tayem Timur, Ciporos, Tayem, Bengbulang, Cidadap dan Desa Pangawaren. Tanah longsor di Desa Gunungtelu mengakibatkan sembilan rumah milik warga roboh dan rusak berat. (Mak)-f

**16% Belanja**

seusai Rapat Paripurna Persetujuan Bersama terhadap APBD 2021, Selasa (17/11).

Dalam APBD 2021 target Pendapatan Daerah disepakati sebesar Rp 5,72 triliun, namun estimasi total Belanja Daerah membengkak sebesar Rp 6,09 triliun, sehingga total prakiraan defisit anggaran mencapai Rp 363 miliar. Defisit ini akan ditutup dengan Pembiayaan Neto. "Jumlah Pendapatan dan Belanja itu realistis, telah didapatkan melalui proses pembahasan yang cermat dan terukur," ujar Wakil Ketua DPRD DIY Suharwanta ST.

Menurut Suharwanta, Dewan dan Penda DIY untuk 2021 tetap fokus pada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup,

**Sambungan hal 1**

dan penyediaan jaring pengaman sosial. "BTT disiapkan setiap saat mengikuti perkembangan pandemi maupun erupsi Merapi. Kita antisipasi kecukupan anggaran untuk penanganan darurat dan hal mendesak untuk dilakukan," katanya.

Pada pelaksanaan anggaran nantinya, APBD akan dimanfaatkan secara optimal untuk penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya, termasuk di dalamnya segala upaya-upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang saat ini telah terpukul dengan sangat keras. "Harapannya, pertumbuhan ekonomi yang sekarang minus akan bisa plus lagi pada 2021," ujar Wakil Ketua DPRD DIY Anton Prabu Semendawai SH MKn. (Bro/Awh)-f

**Politik**

Kedua, pemusatan kekuasaan. Pada masa Orde Baru, developmentalisme menjadi ideologi politik yang meniscayakan 'tertib sosial'. Pembangunan, dalam bayangan rezim, hanya mungkin terjadi jika tidak terjadi 'gejolak' di tengah-tengah masyarakat. Rakyat hanya dituntut untuk membebek pada kehendak rezim. Tidak boleh ada kritik. Tidak ada ruang perbedaan pada cara memaknai cara pembangunan, meskipun orientasinya sama-sama 'membangun'.

Pemusatan tersebut menyebabkan terjadinya absolutisme kekuasaan. Situasi demikian berlawanan dengan adagium Acton dalam politik. *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*. Dalam konteks itu, terjadi korupsi di dalam pembangunan, bahkan korupsi pembangunan.

Ketiga, matinya inisiatif lokal yang disebabkan 'perampasan' hakikat dan saluran politik pusat. Hal ini tentu saja berlawanan dengan ideal yang dikemukakan Tip O'neill bahwa *all the politics is local*. Situasi tersebut juga bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan penting yaitu subsidiaritas. Dalam prinsip tersebut, tata kelola yang baik dibayangkan memberikan akomodasi penuh terhadap lokal. Komunitas politik di tingkat pusat seharusnya tidak mengambil alih urusan-urusan yang dapat dikelola oleh komunitas politik yang lebih rendah. Pusat, idealnya,

**Sambungan hal 1**

hanya diberikan otoritas politik untuk menangani urusan daerah, hanya jika keadaan betul-betul membutuhkan.

Dua dekade lebih setelah reformasi, kita mesti mengantisipasi pembalikan tata kelola dari desentralisasi ke resentralisasi. Salah satu isu yang tidak cukup mendapat perhatian publik, terutama di Dalam Negeri, soal politik resentralisasi dalam UU UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tentu saja dalam konteks perizinan. UU dimaksud dapat menjadi instrumen bagi penguatan 'kebangkitan pohon otoritarianisme' seperti diindikasikan *The Economist* ketika mengkritik UU Ini. Dalam UU tersebut, kewenangan perizinan akan dialihkan semua kepada pemerintah pusat. UU Cipta Kerja akan menariskan kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara, dua sumber daya ekstraktif yang sangat strategis, baik secara ekonomi maupun politik.

UU ini mengatur, terutama pada Pasal 166 versi terakhir yang beredar ke publik, bahwa Peraturan Presiden bisa membatalkan Peraturan Daerah. Di satu sisi, ketentuan

tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV yang menghapus kewenangan pusat untuk membatalkan Peraturan Daerah. Di sisi lain, *beleid* tersebut bertentangan dengan spirit tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana tuntutan demokrasi.

Kita tentu saja mengkhawatirkan bahwa situasi demikian akan 'menghabisi' kekuasaan politik lokal atas nama kepentingan ekonomi, pembangunan investasi, dan infrastruktur. Jangan-jangan yang sedang bekerja sesungguhnya pendekatan kekuasaan dalam ekonomi politik (Caporasso dan Levine, 1992). Bahwa kekuasaan digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan bagi penetrasi pasar dalam pembangunan negara, termasuk hambatan lokal.

Untuk mengantisipasi politik resentralisasi melalui UU Cipta Kerja, kita tentu berharap Pilkada 2020 akan menghadirkan lokal yang lebih memiliki posisi tawar di hadapan sentral. (Penulis adalah Pengajar Ilmu Politik di PKnH FIS UNY; Mahasiswa Doktor Ilmu Politik FISIP UI)-d

**SATU ORANG TEWAS**

**Empat Pekerja Tersengat Listrik**

**WATES (KR)** - Empat orang pekerja tersengat arus listrik saat memasang tiang besi kabel fiber optik di wilayah Pedukuhan I Kalurahan Gotakan Kapanewon Panjatan, Selasa (17/11). Kejadian tersebut mengakibatkan satu orang pekerja tewas dan tiga orang pekerja harus mendapat perawatan medis di rumah sakit.

Kasubbag Humas Polres Kulonprogo, Iptu I Nengah Jefri saat dikonfirmasi *KR* membenarkan adanya laporan kejadian. Bermula saat empat orang pekerja asal Mulyosari Sumbermanjing Wetan Malang Jawa Timur, yakni Sulton Ramadan (18), Sulton Budikatama (19), Arif (21) dan Roni Sianturi (18) bermaksud memasang tiang besi kabel fiber optik sekitar pukul

15.00.

Saat hendak memasukkan tiang besi ke lubang di tanah, ujung bagian atas tiang tersebut menyentuh kabel jaringan listrik PLN, sehingga mengakibatkan empat orang pekerja terserut. Dua teman lainnya kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Panjatan.

"Akibat kejadian tersebut, satu orang pekerja atas nama Sulton Ramadan meninggal dunia. Sedangkan, tiga orang pekerja lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Kharisma Paramedika Wates untuk mendapat perawatan medis. Analisa dari kasus ini, korban kurang berhati-hati saat memasang tiang besi, sehingga ujung tiang mengenai jaringan kabel listrik PLN," jelasnya. (M-4)-f

**Adjustable 3D Printed Face Shield Karya Mahasiswa Teknik Mesin UNY Hasil Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi (PPPTV)**



■ Peluncuran Adjustable 3D Printed Face Shield oleh Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Mesin bersama Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UNY

**PROGRAM** Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi (PPPTV) merupakan program dari Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi program studi dengan kebutuhan industri dan serapan lulusan oleh Industri dan Dunia Kerja (IDUKA). Program Studi Diploma III Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) telah berkontribusi dalam pelaksanaan PPPTV melalui tiga kegiatan utama yaitu penguatan pembelajaran berbasis industri (teaching factory), penguatan inovasi vokasi, dan penguatan kerjasama industri. Salah satu kegiatan yang mendukung dalam masa pandemi Covid-19 adalah

penguatan inovasi vokasi melalui pengabdian kepada masyarakat tentang Covid-19.

Prodi D-III Teknik Mesin melalui PPPTV telah menghasilkan dua produk pengabdian kepada masyarakat yaitu Adjustable 3D Printed Face Shield dan prototipe ventilator. Kedua alat tersebut merupakan upaya Prodi D-III Teknik Mesin untuk mendukung pemerintah mencegah penyebaran Covid-19. Produk ini telah melalui proses front end engineering design, review design, analisis teknik, detail engineering design, proses manufaktur, dan validasi ahli teknik.

Peluncuran Adjustable 3D Printed Face Shield dilaksanakan pada 15 November 2020 oleh Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Mesin (Dr. Apri Nuryanto, M.T.) dan Wakil

Rektor Bidang Umum dan Keuangan UNY (Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd.). Harapan dari peluncuran produk ini dapat mempromosikan produk-produk inovatif mahasiswa Teknik Mesin UNY baik internal maupun eksternal. Keunggulan dari Adjustable 3D Printed Face Shield karya Bima Agung Setyawan, Muhammad Choirun Khamim, Charles Thomas Rio Tarigan, dan Muhammad Iqbal di bawah bimbingan Surono, M.Pd. ini adalah: (1) menggunakan bahan dasar plastik biodegradable yang ramah lingkungan, (2) muka dapat dibuka dan ditutup untuk memudahkan makan atau minum, (3) dilengkapi dengan adjuster yang dapat mengatur jarak wajah dan muka, (4) meminimalisir terjadinya pengembunan, (5) sistem klip memudahkan dalam melakukan pemasangan dan penggantian muka apabila muka sudah kotor, dan (6) nyaman di kepala karena dilengkapi tali elastis yang nyaman dipakai serta mudah disesuaikan dengan lingkaran kepala.

Prodi D-III Teknik Mesin optimis dapat konsisten dalam melakukan hilirisasi riset melalui pengabdian masyarakat yang bermanfaat dan berdaya guna. Adjustable 3D Printed Face Shield yang didanai PPPTV selanjutnya akan disebarluaskan kepada masyarakat luas, termasuk tenaga medis untuk membantu masyarakat dan mendukung program pemerintah dalam melaksanakan new normal life di masa pandemi Covid-19. Adanya PPPTV ini dapat menjadi jembatan dalam "menikahkan" Prodi Diploma-III Teknik Mesin dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) sehingga produk-produk inovasi mahasiswa semakin dilirik industri untuk diproduksi massal dan didistribusikan kepada masyarakat luas. (feb)



■ Proses Pembuatan Adjustable 3D Printed Face Shield oleh Mahasiswa Teknik Mesin UNY



KR-JOS/RSV